

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi-otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004). Pemerintah Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Agustino, 2008).

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan seluas-luasnya untuk mengelola pemerintahan dan menjalankan roda pemerintahan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Daerah juga dituntut mempertanggungjawabkan pengelolaan pemerintahan tersebut kepada rakyat sebagai salah satu bentuk laporan kinerja keuangan yang telah dicapai selama satu periode. Kinerja keuangan merupakan hasil dari banyak keputusan keuangan individual yang dibuat secara terus-menerus pada suatu lembaga atau institusi (Oktavianingyas, 2009).

Kinerja pemerintah daerah ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat menuntut pemerintah mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Mahsum (2006) mengatakan bahwa kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara berlebihan.

Kinerja pemerintah berkaitan erat dengan akuntabilitas, transparansi, pengawasan, tanggung jawab sosial. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Akuntabilitas sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Akuntabilitas publik adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya.

Prinsip akuntabilitas tidak lepas dari prinsip transparansi, keduanya saling berkaitan dalam peningkatan kinerja pemerintahan yang baik. Rahmanurrasjid (2008) mengatakan penerapan azas akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengharuskan pemerintah memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus melakukan berbagai upaya dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Permasalahan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah.

Disisi lain untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah perlu adanya prinsip pengawasan. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat dan menjamin kelancaran penyelenggara tugas pemerintah secara berdaya guna (Halim, 2002). Pengawasan merupakan tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan pegawai organisasi (Hasibuan, 2009). Dengan pengawasan yang baik akan mendorong pegawai lebih giat dalam bekerja dan menghasilkan kerja yang baik pula terlebih

apabila menyelesaikan pekerjaannya dengan semangat yang baik. Sebab dengan adanya pengawasan yang baik maka sesuatu pekerjaan akan dapat berjalan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil yang optimal. Selain adanya prinsip pengawasan juga diperlukan adanya tanggung jawab sosial di dalam kinerja pemerintah.

Hartman (2008) mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan mencakup berbagi tanggung jawab dan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan dimana perusahaan harus mengambil keputusan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik, serta menciptakan lingkungan yang bersih. Konsep tanggung jawab sosial melibatkan tanggung jawab antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif dan dinamis. Ada beberapa hal yang menjadi dasar dukungan terhadap tanggung jawab sosial namun ada juga beberapa argument yang justru membatasi tanggung jawab sosial ini. Dasar-dasar pertimbangan yang menentang pertanggungjawaban sosial diantaranya : menghambat upaya maksimalisasi laba, mengaburkan tujuan perusahaan, dan sebagainya. Masyarakat sangat berharap kinerja pemerintah sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ **Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Keuangan, Dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan (Studi Pada Desa-Desa Se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan keuangan di Desa - Desa se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelolaan keuangan di Desa - Desa se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana pengaruh pengawasan keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan di Desa - Desa se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
4. Bagaimana pengaruh tanggung jawab sosial terhadap kinerja pengelolaan keuangan di Desa - Desa se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
5. Bagaimana pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan keuangan, tanggung jawab sosial secara bersama-sama terhadap kinerja pengelolaan keuangan di Desa - Desa se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan keuangan di Desa - Desa se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelolaan keuangan di Desa - Desa se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan di Desa - Desa se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
4. Untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab sosial terhadap kinerja pengelolaan keuangan di Desa - Desa se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
5. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan keuangan, dan tanggung jawab sosial terhadap kinerja pengelolaan keuangan di Desa - Desa se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagi peneliti

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari selama kuliah ke dalam permasalahan yang nyata di masyarakat.

2. Bagi pegawai

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan terutama untuk pengelolaan keuangan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Menambah wawasan ilmu pengetahuan dengan hasil yang ditemukan selama penelitian bagi pembaca yang akan melakukan pada topik yang sama di masa yang akan datang. Sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang ada, serta bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis.

